

Nifaq Politik : Analisis Konseptual dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis

**Juanda Yusuf Siregar¹, Edi Hermanto², Ahmad Fachri Agustian³, M. Firman Firdaus⁴,
Muhammad Farhan Rozi S⁵**

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
Pekanbaru, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: juandasyu7@gmail.com, edi.hermanto@uinsuska.ac.id, ahmadfachri220899@gmail.com,
firmanfirdaus309@gmail.com, farhanrozi06@gmail.com

Diterima: 22-12-2025 | Disetujui: tg1-02-01-2026 | Diterbitkan: 04-01-2026

ABSTRACT

Political nifaq refers to a form of hypocrisy manifested in the exercise of power, characterized by a discrepancy between moral rhetoric and actual political conduct. In Muslim societies, political nifaq becomes a critical issue as religious symbols and discourse are often exploited to gain public legitimacy. This article aims to examine the concept of political nifaq from the perspectives of the Qur'an and the Prophetic traditions, as well as its implications for Islamic political ethics. This study employs a qualitative library research method with a normative theological approach, utilizing the Qur'an, hadith, classical exegesis, and Islamic political thought literature as primary sources. The findings indicate that political nifaq constitutes an ethical deviation from Islamic political principles, leading to declining public trust, a crisis of leadership legitimacy, and moral degradation in political life. Therefore, Islam emphasizes honesty, trustworthiness, and consistency between words and actions as fundamental principles for establishing ethical and responsible political practices.

Keywords: *political nifaq, hypocrisy, Islamic political ethics, Qur'an and Hadith.*

ABSTRAK

Nifaq politik merupakan fenomena kemunafikan yang muncul dalam praktik kekuasaan, ditandai oleh ketidaksesuaian antara retorika moral dan tindakan politik yang nyata. Dalam konteks masyarakat Muslim, nifaq politik menjadi persoalan serius karena sering kali dibungkus dengan simbol dan bahasa agama untuk memperoleh legitimasi publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep nifaq politik dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis serta implikasinya terhadap etika politik Islam. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif normatif-teologis, dengan menjadikan Al-Qur'an, hadis Nabi ﷺ, tafsir, dan literatur pemikiran politik Islam sebagai sumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nifaq politik merupakan penyimpangan etika siyasah Islam yang berdampak pada melemahnya kepercayaan publik, krisis

legitimasi kepemimpinan, dan degradasi moral dalam kehidupan politik umat. Oleh karena itu, Islam menegaskan pentingnya kejujuran, amanah, dan konsistensi antara ucapan dan perbuatan sebagai fondasi utama dalam praktik politik yang berkeadaban.

Kata kunci: nifaq politik, kemunafikan, etika politik Islam, Al-Qur'an dan hadis.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Juanda Yusuf Siregar, Edi Hermanto, Ahmad Fachri Agustian, M. Firman Firdaus, & Muhammad Farhan Rozi S. (2026). Nifaq Politik : Analisis Konseptual dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. Jurnal Teologi Islam, 2(1), 137-143. <https://doi.org/10.63822/d504v338>

PENDAHULUAN

Politik merupakan dimensi penting dalam kehidupan sosial manusia, karena berkaitan langsung dengan pengelolaan kekuasaan, pengambilan kebijakan publik, serta distribusi keadilan dan kesejahteraan. Dalam perspektif Islam, politik tidak dipahami sebagai aktivitas yang terpisah dari nilai-nilai moral dan spiritual, melainkan sebagai bagian dari amanah kekhalifahan manusia di muka bumi. Konsep siyāsah dalam Islam menuntut adanya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab moral dalam setiap praktik kekuasaan, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama klasik dan kontemporer.

Namun demikian, realitas politik sering kali memperlihatkan paradoks antara idealitas ajaran Islam dan praktik politik yang berlangsung di tengah masyarakat. Salah satu fenomena yang menonjol adalah munculnya perilaku nifaq dalam ranah politik, yang dikenal sebagai nifaq politik. Nifaq politik terjadi ketika seseorang atau kelompok menampilkan sikap, simbol, dan retorika keagamaan atau moralitas di ruang publik, tetapi menyembunyikan niat yang bertentangan dengan nilai kebenaran, keadilan, dan amanah. Fenomena ini bukan hanya persoalan etika individu, tetapi telah menjadi problem struktural yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan keagamaan umat.

Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat serius terhadap perilaku nifaq. Bahkan, kaum munafik digambarkan sebagai kelompok yang lebih berbahaya daripada orang kafir yang terang-terangan memusuhi Islam, karena kemunafikan dilakukan secara terselubung dan merusak dari dalam. Dalam Al-Qur'an, orang-orang munafik digambarkan sebagai pihak yang menjadikan sumpah dan ucapan mereka sebagai alat penipuan, serta menggunakan agama sebagai kedok untuk kepentingan duniawi. Gambaran ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan praktik politik kontemporer, di mana agama kerap dijadikan instrumen legitimasi kekuasaan.

Dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ, nifaq juga dipahami sebagai penyakit moral yang memiliki indikator jelas, seperti dusta, ingkar janji, dan khianat terhadap amanah. Ketiga indikator ini merupakan unsur fundamental dalam aktivitas politik. Janji politik, kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat, serta kepercayaan publik merupakan fondasi utama sistem politik yang sehat. Ketika nilai-nilai tersebut dirusak oleh perilaku nifaq, maka politik kehilangan fungsi etikanya dan berubah menjadi sarana manipulasi kekuasaan.

Kajian tentang nifaq politik menjadi semakin penting dalam konteks masyarakat Muslim modern, di mana demokratisasi, kebebasan berekspresi, dan kompetisi politik sering kali membuka ruang luas bagi eksploitasi simbol agama. Tanpa pemahaman yang kokoh mengenai konsep nifaq dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis, umat berpotensi terjebak pada legitimasi semu terhadap perilaku politik yang bertentangan dengan nilai Islam. Oleh karena itu, kajian ini berupaya mengkaji nifaq politik secara konseptual dan normatif dengan merujuk pada sumber-sumber primer Islam serta pemikiran para ulama, guna memberikan landasan etis bagi praktik politik yang berkeadaban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian library research (studi kepustakaan). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa konsep, gagasan, dan nilai normatif yang bersumber dari teks-teks keagamaan dan literatur ilmiah, bukan data empiris lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis konsep nifaq politik dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis, serta penjelasan para

ulama klasik dan kontemporer mengenai etika politik Islam.

Sumber data penelitian terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis, khususnya Ṣaḥīḥ Muslim, yang memuat penjelasan tentang karakteristik nifaq dan indikator kemunafikan. Selain itu, tafsir Al-Qur'an seperti Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm karya Ibn Katsir dan Fī Zilāl al-Qur'ān karya Sayyid Qutb digunakan untuk memahami konteks ayat-ayat tentang nifaq secara komprehensif.

Sumber sekunder mencakup buku-buku pemikiran politik Islam, artikel jurnal ilmiah, serta karya ulama dan cendekiawan Muslim yang membahas hubungan antara moralitas, kekuasaan, dan kepemimpinan. Karya-karya seperti Al-Aḥkām al-Sultāniyyah karya al-Mawardi dan Fiqh al-Daulah fi al-Islam karya Yusuf al-Qaradawi digunakan sebagai rujukan dalam memahami prinsip-prinsip siyasah syar'iyah dan etika politik Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur (literature searching) terhadap kitab-kitab klasik dan referensi kontemporer yang relevan dengan tema nifaq dan politik Islam. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan konsep-konsep utama yang berkaitan dengan nifaq politik, baik secara tekstual maupun kontekstual.

Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan normatif-teologis, dengan menempatkan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama nilai dan norma, kemudian dikontekstualisasikan dengan realitas politik kontemporer. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman konseptual yang utuh mengenai nifaq politik serta implikasinya terhadap etika kepemimpinan dan kehidupan politik umat Islam.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nifaq politik merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek teologis, tetapi juga memiliki implikasi sosial, moral, dan struktural dalam kehidupan politik umat Islam. Berdasarkan kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi ﷺ, serta pandangan para ulama klasik dan kontemporer, nifaq politik dapat dipahami sebagai bentuk kemunafikan yang diekspresikan melalui praktik kekuasaan yang manipulatif dan tidak berorientasi pada kemaslahatan umat.

Pertama, dari perspektif Al-Qur'an, nifaq digambarkan sebagai penyakit hati (marad al-qalb) yang menyebabkan ketidaksesuaian antara keyakinan batin dan perilaku lahiriah. Orang-orang munafik menampilkan keimanan secara verbal dan simbolik, namun menyembunyikan sikap penentangan terhadap nilai kebenaran dalam tindakan nyata. Dalam Al-Qur'an, Allah menegaskan bahwa mereka mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka bukan orang-orang beriman. Temuan ini menunjukkan bahwa nifaq memiliki pola penipuan sistematis yang sangat relevan dengan praktik politik, di mana citra, slogan, dan retorika sering digunakan untuk menutupi kepentingan tersembunyi.

Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator nifaq sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi ﷺ memiliki relevansi langsung dengan praktik politik. Rasulullah ﷺ menyebutkan bahwa tanda orang munafik adalah berdusta ketika berbicara, mengingkari janji, dan berkhianat ketika diberi amanah. Dalam konteks politik, dusta dapat diwujudkan dalam propaganda dan manipulasi informasi, ingkar janji tercermin

dalam janji politik yang tidak direalisasikan, sedangkan pengkhianatan amanah tampak dalam penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Dengan demikian, hadis tentang nifaq tidak hanya bersifat normatif-spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen etik untuk menilai praktik politik.

Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa nifaq politik sering kali diwujudkan melalui eksploitasi simbol-simbol agama. Agama dijadikan alat legitimasi untuk memperoleh dukungan massa, sementara kebijakan dan tindakan politik yang diambil justru bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan keberpihakan kepada rakyat. Para ulama menegaskan bahwa penyalahgunaan agama dalam politik merupakan bentuk kemunafikan yang paling berbahaya karena tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga mencederai kesucian ajaran Islam. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa nifaq politik memiliki dampak ideologis yang luas, karena dapat menimbulkan krisis kepercayaan terhadap agama itu sendiri.

Keempat, hasil penelitian menunjukkan bahwa nifaq politik berimplikasi signifikan terhadap kehidupan sosial dan politik umat. Praktik nifaq politik menyebabkan melemahnya legitimasi kepemimpinan, meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap institusi politik, serta tumbuhnya sikap apatis dan sinisme di kalangan masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menghambat terwujudnya tujuan utama siyasah syar'iyah, yaitu menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan (*jalb al- maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*).

Kelima, penelitian ini juga menemukan bahwa nifaq politik tidak selalu muncul dalam bentuk individu, tetapi dapat berkembang menjadi fenomena struktural ketika sistem politik mentoleransi ketidakjujuran dan pengkhianatan amanah. Dalam kondisi demikian, nifaq tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan, melainkan menjadi praktik yang dianggap lumrah dalam politik. Hal ini bertentangan secara fundamental dengan prinsip Islam yang menempatkan kepemimpinan sebagai amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa nifaq politik merupakan ancaman serius terhadap moralitas politik Islam. Islam memandang politik sebagai sarana ibadah dan pelayanan kepada umat, bukan sebagai alat manipulasi dan eksploitasi kekuasaan. Ketika nifaq mendominasi praktik politik, maka kekuasaan kehilangan legitimasi etik dan berpotensi menimbulkan kerusakan sosial yang luas. Oleh karena itu, upaya membangun kesadaran etik dan spiritual dalam politik menjadi kebutuhan mendesak bagi umat Islam.

PEMBAHASAN

Pembahasan ini diarahkan untuk menginterpretasikan hasil penelitian secara lebih mendalam dengan mengaitkannya pada kerangka normatif Islam dan realitas politik kontemporer. Nifaq politik tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penyimpangan moral individu, melainkan sebagai fenomena kompleks yang melibatkan relasi kekuasaan, ideologi, dan struktur sosial.

Nifaq Politik sebagai Penyimpangan Etika Siyasah Islam

Dalam perspektif siyasah Islam, kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Al-Mawardi menegaskan bahwa legitimasi kepemimpinan tidak hanya bersumber dari kekuatan atau dukungan massa, tetapi juga dari integritas moral pemimpin. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nifaq politik muncul ketika prinsip-prinsip tersebut

diabaikan dan kekuasaan dijalankan dengan logika kepentingan pragmatis.

Perilaku nifaq politik mencerminkan ketidaksesuaian antara nilai normatif Islam dan praktik politik yang berlangsung. Dalam Al-Qur'an, kemunafikan dipandang sebagai bentuk kebohongan eksistensial yang merusak tatanan sosial karena menghancurkan kepercayaan (tsiqah) sebagai fondasi kehidupan bersama. Oleh karena itu, nifaq politik secara substantif bertentangan dengan tujuan utama siyasah syar'iyah yang menekankan kemaslahatan umum.

Relasi Nifaq Politik dengan Manipulasi Agama

Pembahasan selanjutnya menunjukkan bahwa salah satu bentuk nifaq politik yang paling dominan adalah manipulasi simbol dan bahasa agama. Agama dijadikan instrumen legitimasi untuk memperoleh dukungan politik, sementara substansi ajaran Islam seperti keadilan sosial dan keberpihakan kepada yang lemah diabaikan. Sayyid Qutb menyebut praktik ini sebagai bentuk kemunafikan ideologis yang berbahaya karena merusak agama dari dalam.

Dalam konteks masyarakat Muslim modern, penggunaan simbol agama dalam politik sering kali sulit dibedakan antara ekspresi keimanan yang tulus dan strategi politik yang manipulatif. Tanpa kerangka etik yang jelas, masyarakat berisiko memberikan legitimasi kepada praktik nifaq politik. Oleh sebab itu, pembahasan ini menegaskan pentingnya literasi politik Islam yang berbasis nilai, bukan sekadar simbol.

Dampak Struktural Nifaq Politik terhadap Kehidupan Umat

Hasil penelitian yang dibahas lebih lanjut menunjukkan bahwa nifaq politik memiliki dampak struktural yang serius. Ketika kemunafikan menjadi praktik yang ditoleransi dalam sistem politik, maka standar moral publik akan mengalami degradasi. Muhammad Imarah menjelaskan bahwa krisis politik di dunia Islam bukan semata-mata krisis sistem, melainkan krisis etika kepemimpinan.

Nifaq politik juga berkontribusi pada melemahnya partisipasi politik yang sehat. Masyarakat cenderung bersikap apatis ketika melihat ketidakkonsistenan antara janji dan realisasi kebijakan. Kondisi ini pada akhirnya menghambat terwujudnya keadilan sosial dan memperbesar jurang ketidakpercayaan antara penguasa dan rakyat.

Relevansi Konsep Nifaq Politik dalam Konteks Kontemporer

Pembahasan ini menegaskan bahwa konsep nifaq politik tetap relevan untuk menganalisis dinamika politik kontemporer, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Nifaq politik dapat dijadikan kategori etik untuk menilai praktik kekuasaan, baik dalam konteks demokrasi modern maupun sistem politik lainnya. Islam tidak menolak politik sebagai instrumen pengelolaan masyarakat, tetapi menolak politik yang kehilangan orientasi moral.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa upaya meminimalisasi nifaq politik memerlukan penguatan etika politik Islam yang berakar pada nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab spiritual. Politik yang berkeadaban hanya dapat terwujud apabila nilai-nilai tersebut dijadikan landasan utama dalam setiap praktik kekuasaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa nifaq politik merupakan fenomena kemunafikan yang beroperasi dalam ranah kekuasaan dengan menampilkan citra moral dan religius secara lahiriah, tetapi menyembunyikan niat serta tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran, keadilan, dan amanah. Dalam perspektif Islam, nifaq politik bukan sekadar persoalan etika individu, melainkan problem serius yang berdampak sistemik terhadap legitimasi kepemimpinan dan tatanan sosial umat.

Kajian terhadap Al-Qur'an dan hadis Nabi ﷺ menunjukkan bahwa nifaq diposisikan sebagai penyakit hati yang sangat berbahaya karena bersifat destruktif dan menipu. Indikator nifaq—seperti dusta, ingkar janji, dan pengkhianatan amanah—memiliki relevansi langsung dengan praktik politik, khususnya dalam relasi antara pemimpin dan masyarakat. Ketika indikator-indikator tersebut menjadi bagian dari praktik politik yang lazim, maka politik kehilangan dimensi etik dan berubah menjadi sarana manipulasi kekuasaan.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa nifaq politik sering kali dilegitimasi melalui eksploitasi simbol dan bahasa agama. Praktik tersebut tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap pemimpin, tetapi juga mencederai kesucian ajaran Islam itu sendiri. Dalam jangka panjang, nifaq politik berpotensi melahirkan krisis kepercayaan, apatisme politik, dan degradasi moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, upaya meminimalisasi nifaq politik menuntut penguatan etika politik Islam yang berorientasi pada nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab spiritual. Politik dalam Islam seharusnya dipahami sebagai sarana ibadah dan pelayanan kepada umat, bukan sekadar instrumen perebutan kekuasaan. Dengan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai landasan utama, praktik politik diharapkan mampu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sebagaimana tujuan luhur ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi. *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997. Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jilid VIII. Damaskus: Dār al-Fikr, 2011.
- Ibn Katsir. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.
- Ibn Manẓūr. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣādir, 1990.
- Imarah, Muhammad. *Al-Islam wa al-Siyāsah*. Kairo: Dār al-Syurūq, 2011.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. California: Sage Publications, 2018.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t. Qutb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Syurūq, 2003.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.